



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

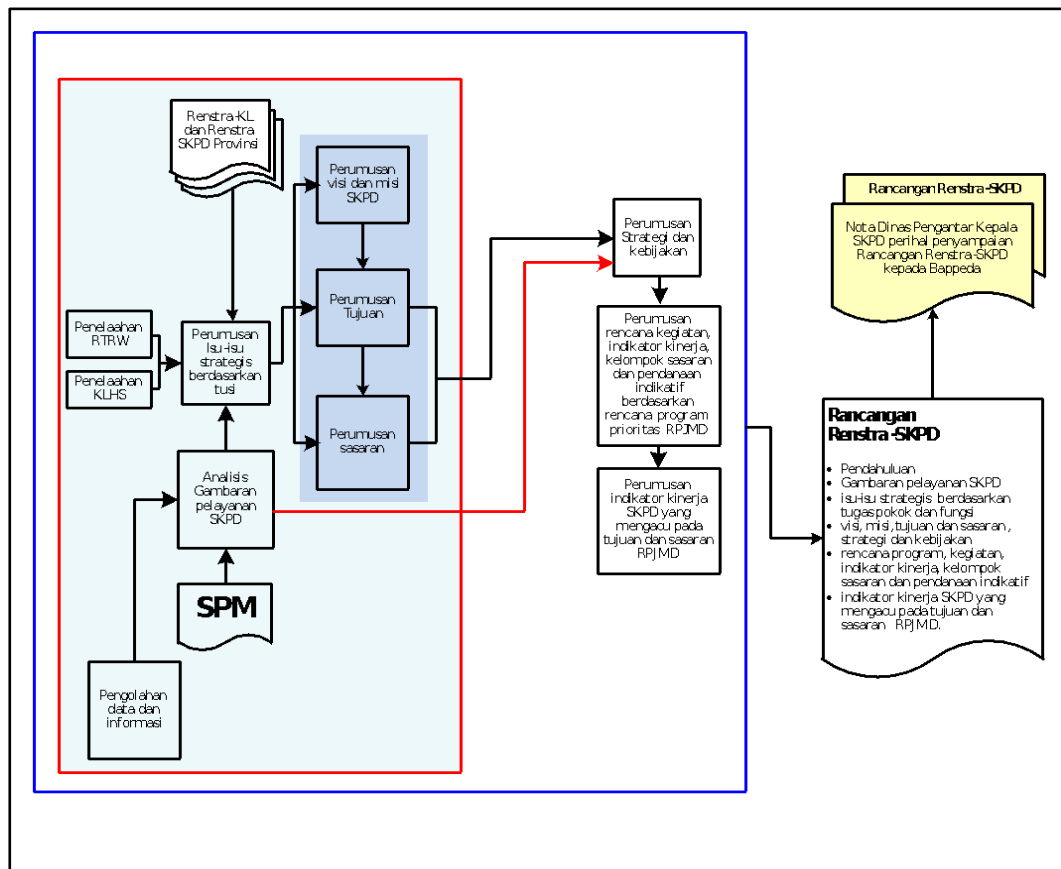
Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD, Renstra K/L, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, RPJMD Provinsi DIY dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Yogyakarta.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 pada Bab ini.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam Tabel 6.1 (*download Laporan Renstra Perangkat Daerah dari SIPD*)

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah

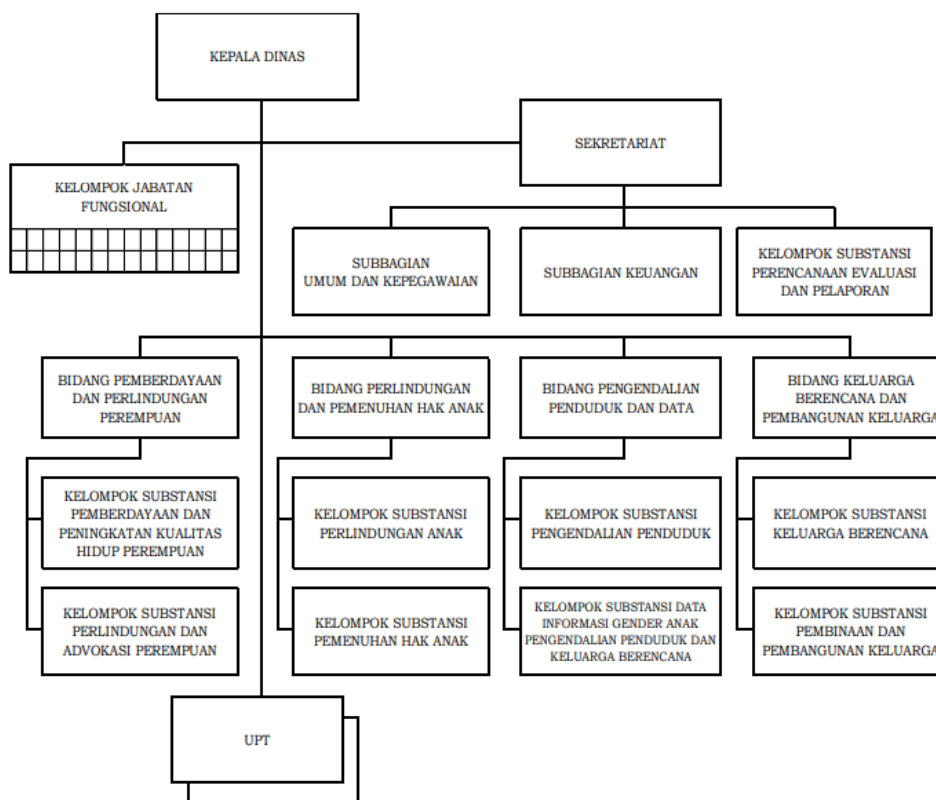
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan dan Advokasi Perempuan
4. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak, dan
 - b. Kelompok Substansi i Perlindungan Anak
5. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - a. Kelompok Substansi Keluarga Berencana, dan
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Data
 - a. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk
 - b. Kelompok Substansi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Unit Pelaksana Teknis, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.1.1.
Struktur Organisasi DP3AP2KB



2.1.2 Uraian Tugas

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian

- penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
 - k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
 - n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021

No	Kategori	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Eselon II b				1	
2	Eselon III a				1	
3	Eselon III b				4	
5	Esselon IV a				9	3
6	Eselon IV b				1	
7	Fungsional Umum		5	2	6	
8	Fungsional tertentu					
	Jumlah		5	2	22	3

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 86 orang, namun pegawai ASN yang ada 32 orang, tenaga teknis 26 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 64 orang atau 74,42% .

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2021**

No	Nama Barang	Jumlah
1	AC	37
2	Access Point	8
3	Aipon	1
4	AIR PURIFIER	3
5	Alamari Arsip Pintu Sliding	4
6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	11
7	Alat Peraga Edukatif	2
8	Almari buku	1
9	Almari Arsip	1
10	Almari Arsip Kayu Lereg Kaca	1
11	Almari besi 2 pintu	10
12	Almari Besi Lereg Kaca	18
13	Almari Buku	7
14	Almari Display Kaca	2
15	Almari es 2 pintu	1
16	Almari Etalase	1
17	Almari Kayu	13
18	Almari Lereg Kaca	2
19	Almari Locker Rak	1
20	Almari Pakaian	1
21	Amplifer	1
22	APE	1
23	Ayunan Bulat	1
24	Baby Dress Table	1
25	Backdrop	1
26	Balok Natural	1
27	Box bayi	10
28	Brankas	2
29	Burung Garuda	1
30	Camera	1
31	CCTV	2
32	Cermin	1
33	Contener Box Besar	10
34	Dipan	1
35	Dispenser	14
36	Exhaust Fan	5
37	Feling Cabinet	44
38	Fingerspot (Mesin Absensi)	2

No	Nama Barang	Jumlah
39	Gordein	5
40	Hand Dryer	1
41	Handphone	1
42	Handycam	1
43	HP hoflen	1
44	Jam Dinding	17
45	Jembatan Goyang + Tangga Pelangi	1
46	Join Table 1/2 Lingkaran	4
47	Kaca Hias / Pigura / Alat Hiasan	1
48	Kalkulator	12
49	Kamera	1
50	Kamera CCTV	1
51	Kamera Foto Digital	5
52	Kamera video Digital	3
53	Kardek besi	1
54	Karpet	9
55	Kasur vinil 120 x 200 m	8
56	Kendaraan Roda 4	2
57	Kipas,duduk, gantung, berdiri,baling2	39
58	Kompur Gas	1
59	Komputer	56
60	Komputer Tablet	2
61	KORDEN	1
62	Kuda Goyang	1
63	Kuda Goyang A	2
64	Kulkas	8
65	Kursi Biasa/staff	2
66	Kursi Putar Sandaran Rendah	2
67	Kursi Susun	150
68	kursi besi	6
69	Kursi Besi Bentuk Payung	1
70	Kursi biasa	8
71	Kursi duduk Besi Minimalis	1
72	Kursi Hadap Size / Zice	2
73	Kursi Kerja	42
74	Kursi Kuliah Lipat	131
75	Kursi Makan Anak	24
76	Kursi Pameran	29
77	Kursi Putar	42
78	Kursi Rapat	46
79	Kursi rapat / lipat	69
80	Kursi rapat / susun	2
81	Kursi Rapat Lipat	30
82	Kursi Sidang	2
83	Kursi Tamu/Sice	1
84	Kursi tunggu 4 seat besi	5

No	Nama Barang	Jumlah
85	Lap Top (Note Book)	5
86	Laser Pointer	3
87	Layar LCD	5
88	LCD	30
89	Lemari Kaca	25
90	Main Distribution Frame (MDF) + Lsa Krone kap. 20 pair	1
91	Media Edukasi	1
92	Megaphone	1
93	Meja 1 Biro	65
94	Meja Edukit	1
95	Meja Ganti Popok	2
96	Meja Kayu	40
97	Meja Knap	7
98	Meja komputer	6
99	Meja Konseling	5
100	Meja Kursi Tamu	1
101	Meja Lipat	4
102	Meja Makan Anak Kayu Oval	4
103	Meja Rapat	36
104	Meja resepsionis	1
105	Meja setengah lingkaran	6
106	Meja Tambahan	1
107	Mesin Cuci	4
108	Mesin Faximile	2
109	Mesin Ketik	5
110	Mesin Pompa Air	1
111	Mesin presensi sidik jari	1
112	Mesin Tik	1
113	Mic stand	2
114	Mic Wireless	1
115	Microphone	2
116	Minibus	6
117	modal meja lipat (Hand made)	20
118	Modala Rangka Becdrop Portable	1
119	Note Book	42
120	Obsgyn bed	2
121	Panjatan Jala	1
122	Papan Nama	188
123	PC Komputer	17
124	Pengeras Suara	1
125	Perlengkapan Display Pameran	1
126	Personal Komputer	2
127	Pigura Gambar Wakil Pres.	2
128	Pigura Gambar pres	2
129	Player	1

No	Nama Barang	Jumlah
130	Pointer	9
131	Pompa Air	2
132	Printer	60
133	Projector	3
134	Prosotan 5 tangga	1
135	Rail Arcello	1
136	RAK BESI	24
137	Rak Buku	12
138	Rak Dispenser	1
139	Rak Display Kain	15
140	Rak Front Office	1
141	Rak Kayu	6
142	Router	1
143	Running Teks Media Informasi Kependudukan	1
144	Scanner	6
145	Sepeda	2
146	Sepeda Motor	64
147	Sice/Kursi Tamu	1
148	Signage	1
149	Smart Televisi	1
150	Smartphone	23
151	Sofa	9
152	Sound System	6
153	Speaker	2
154	Sprayer	4
155	Station Wagon	2
156	Switch Hub	2
157	Tabung Gas	3
158	Tabung Pemadam	1
159	Tangga Almunium	7
160	Tape Recorder	1
161	Televisi	5
162	Telphon	2
163	Tempat pot tanaman	4
164	Tempat Sampah	7
165	Terminal Box Telepon (TBT-1) + Lsa Krone kap. 10 pair	2
166	Thermogun	10
167	Tiang Bendera	1
168	Tiang Join Bulat+Plat Ring Chrome	4
169	Tiang Mic Berdiri	2
170	Timbangan injak	1
171	Trolley Barang Beroda	3
172	TV 21 inchi	1
173	UPS	4
174	Vaccum Cleaner	3
175	Vertical Blind	1

No	Nama Barang	Jumlah
176	Wall Exhaust fan	6
177	Wallmount	2
178	Wastafel portabel	2
179	White Board	20
180	Wireles sound system	2
181	Wireles cassette unit	13
182	Zice	5
183	Web cam	7
184	Gantungan Jas	3
185	Genset	1
186	Handy Talky (HT)	3
187	Head Set	3
188	Jemuran	2
189	Kotak Surat	1
190	Pallet	17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2021

Tabel 2.3.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017 – 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani				74%	76%	78%	80%	83,20%	82.28%	88.64%	86.76%	91.40%	87.23%	111.19%	116.63%	111.23%	114.25%	104.84%
2	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif				47%	53%	59%	64.58%	72.22%	51%	57.45%	63%	86.46%	72.22%	108.51%	108.40%	106.78%	134.05%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)				24%	36%	47%	58.82 %	83.33%	25%	45.10%	80.39%	62.75%	92.86%	104.17 %	125.28 %	171.04 %	106.72 %	111.44%
4	Persentase Lembaga layanan keluarga yang aktif				-	-	-	-	67.47%	-	-	-	-	73.36%	-	-	-	-	108.73%
5	Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga				-	-	-	-	4%	-	-	-	-	5.61%	-	-	-	-	140.25%

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase Lembaga yang melaksanakan data pilah				-	-	-	-	62%	-	-	-	-	72%	-	-	-	-	116.13%
7	Persentase jumlah kelurahan layak anak				31%	53%	66%	90%	100%	31.11%	53.33%	80%	100%	100%	100.35%	100.62%	121.21%	111.11%	100%
8	Persentase puskesmas ramah anak				60%	70%	80%	100%	100%	55.56%	72.22%	100%	100%	100%	92.60%	103.17%	125%	100%	100%
9	Persentase sekolah ramah anak (sekolah negeri TK s/d SMP)				18.5%	35%	52%	73.87%	90.99%	17.12%	35.14%	61.26%	77.48%	100%	92.54%	100.4%	117.81%	104.99%	109.90%
10	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	CBR (Crude Birth Rate)				11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	8.77 CBR	8.64 CBR	8.12 CBR	7.48 CBR	6.53 CBR	125.43 %	127.31 %	135.47 %	147.06 %	168.45%
12	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed)				11.40%	13%	11.28 %	11.22 %	11.16%	13.74%	15.13%	9.38%	10.84%	11.15%	82.97%	85.92%	119.40 %	103.32 %	100.09%
13	CPR (contraceptive prevalence rate)				73.66%	70.18 %	73.77 %	73.83 %	73.94%	70.18%	68.19%	77.91%	73.17%	69.90%	95.27%	97.40%	105.71 %	99.15%	94.54%
14	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga				27.15%	27.80 %	29.70 %	31.12 %	32.58%	26.91%	25.93%	27.27%	28.70%	32.59%	99.12%	93.27%	91.82%	92.28%	100.03%

2.3.2. Evaluasi Kinerja Tahun 2017 - 2021

Dari tabel 2.3.1.1 dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2021, dari 14 (empat belas) indikator kinerja, 9 (sembilan) di antaranya telah melebihi target tahunan/RPJMD, 4 (empat) capaiannya sama dengan target dan 1 (satu) lainnya masih di bawah target.

Sembilan indikator kinerja yang telah melebihi target tersebut adalah:

- Persentase perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani dengan realisasi capaian 87,23% dengan persentase nilai 104,84%.
- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan realisasi capaian 92,86% dengan persentase nilai 111,44%.
- Persentase Lembaga layanan keluarga yang aktif dengan realisasi capaian 73,36% dengan persentase nilai 108,73%.
- Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga dengan realisasi capaian 5,61% dengan persentase nilai 140,25%.
- Persentase Lembaga yang melaksanakan data pilah dengan realisasi capaian 72% dengan persentase nilai 116,13%.
- Persentase sekolah ramah anak (sekolah negeri TK s/d SMP) dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 109,90%.
- CBR (Crude Birth Rate) dengan realisasi capaian 6.53 CBR dengan persentase nilai 168,45%.
- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed) dengan realisasi capaian 11,15% dengan persentase nilai 100,09%.
- Persentase kelompok kegiatan bina keluarga dengan realisasi capaian 32,59% dengan persentase nilai 100,03%.

Sedangkan 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target adalah:

- Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif dengan realisasi capaian 72,22%.
- Persentase jumlah kelurahan layak anak dengan realisasi capaian 100%.
- Persentase puskesmas ramah anak dengan realisasi capaian 100%.
- Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dengan realisasi capaian 100%.

Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah:

- CPR (*contraceptive prevalence rate*) dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.

Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

- 1) Persentase perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani dengan realisasi capaian 87,23% dengan persentase nilai 104,84%.

Peningkatan persentase perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani di kota Yogyakarta ini didorong oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

- Kesadaran, kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan semakin tinggi.
 - UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai lembaga untuk pengaduan kekerasan sudah banyak dikenal masyarakat.
 - Peran satgas sigrak, puskesmas, Pengadilan Agama, penyintas kekerasan, jejaring/mitra kerja meningkat.
 - Peran media sosial sebagai sarana informasi terjadinya tindak kekerasan mempercepat penjangkauan korban.
- 2) Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif dengan realisasi capaian 72,22%.

Hal tersebut didorong karena sudah adanya penguatan kelembagaan PUG yang aktif

- 3) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan realisasi capaian 92,86% dengan persentase nilai 111,44%.

Hal ini didorong oleh beberapa hal, di antaranya adalah:

- Pendampingan PPRG mulai dari penyusunan renja OPD bersama dengan OPD driver (Bappeda , DP3AP2KB , inspektorat , BPKAD)
- Sudah tersusun pedoman PPRG
- Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga social untuk penyelenggaraan pelatihan PPRG, pendampingan PPRG oleh OPD driver

- 4) Persentase Lembaga layanan keluarga yang aktif dengan realisasi capaian 73,36% dengan persentase nilai 108,73%.

Untuk melampaui target tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana telah berupaya melakukan pendampingan tingkat kota dan peningkatan kapasitas bagi lembaga.

- 5) Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga dengan realisasi capaian 5,61% dengan persentase nilai 140,25%. Pencapaian target tersebut ikut didorong karena telah banyaknya lembaga layanan keluarga yang tersebar di wilayah, sehingga konseling keluarga menjadi lebih mudah dan cepat terlayani.
- 6) Persentase Lembaga yang melaksanakan data pilah dengan realisasi capaian 72% dengan persentase nilai 116,13%.

Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya pemahaman OPD dalam melaksanakan data pilah dan didukung pula dengan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Sosialisasi PUG, FGD pemanfaatan data gender dan anak, dan pelatihan membuat GAP dan GBS.

- 7) Persentase jumlah kelurahan layak anak dengan realisasi capaian 100%.

Pencapaian ini didorong dengan adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara OPD terkait, pemangku wilayah, serta lembaga kemasyarakatan seperti PATBM, Forum Anak, Kampung Ramah Anak sebagai salah satu upaya dalam membangun komitmen yang kuat di wilayah dalam mendukung kebijakan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta.

- 8) Persentase puskesmas ramah anak dengan realisasi capaian 100%. Pencapaian ini berkat komitmen bersama antar OPD terkait, terutama Komitmen Kepala Dinas Kesehatan yang cukup tinggi dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan melalui pelayanan ramah anak di puskesmas serta sudah terpenuhinya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Puskesmas.
- 9) Persentase sekolah ramah anak (sekolah negeri TK s/d SMP) dengan realisasi capaian 100% dengan persentase nilai 109,90%. Pencapaian ini dipicu oleh keaktifan beberapa sekolah yang telah menjadi Sekolah Ramah Anak lebih awal dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan Sekolah Ramah Anak serta adanya fasilitas SRA tingkat nasional yang telah mengikuti pelatihan di pusat.
- 10) Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani dengan realisasi capaian 100%.

Pencapaian ini didorong beberapa di antaranya adalah:

- Kerjasama dan sinergitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah locus kejadian,
 - Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya,
 - Sekolah dan wilayah mau bekerjasama dengan UPT PPA dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.
- 11) CBR (*Crude Birth Rate*) dengan realisasi capaian 6.53 CBR dengan persentase nilai 168,45%. Pencapaian tersebut dipicu oleh tingginya kesadaran masyarakat Yogyakarta untuk membatasi jumlah kelahiran (jumlah anak).
 - 12) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) dengan realisasi capaian 11,15% dengan persentase nilai 100,09%.

Untuk mencapai target yang ditentukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data yang dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan capaian target kinerja, sehingga dapat menekan angka *unmet need* melebihi target
- Baksos pelayanan KB (dengan dana BOKB) turut mendukung pencapaian target meskipun serapan keuangan tidak maksimal karena target keuangan given dari Pusat terlalu tinggi.

- 13) CPR (*contraceptive prevalence rate*) dengan realisasi capaian 69,90% dengan persentase nilai 94,54%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target CPR, di antaranya telah memperbanyak kerjasama dengan Faskes yang melayani Pelayanan KB melalui dana BOKB, namun realisasi capaian belum bisa memenuhi target.

Faktor penghambat secara garis besar dikarenakan masih berlangsungnya masa pandemi tepatnya sejak tahun 2019. Beberapa di antaranya adalah:

- calon akseptor menunda akses layanan KB di Puskesmas karena masih takut dengan situasi pandemic.
- Demikian pula terjadinya PPKM Darurat selama bulan Juli dan Agustus 2021, faskes banyak yang menunda pelayanan KB karena takut tertular, meskipun sudah dilindungi dengan APD terstandar.
- Pada bulan Juni 2021 layanan di rumah sakit yang melayani MOW sudah mulai mengalami kelangkaan oksigen, sehingga calon akseptor yang sudah mendaftar terpaksa tidak dapat dilayani.

- 14) Persentase kelompok kegiatan bina keluarga dengan realisasi capaian 32,59% dengan persentase nilai 100,03%.

- Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dengan digencarkannya sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, TP PKK, dan PKB dalam menambah sasaran

jumlah BKB yang disinergikan dengan Posyandu, Dapur Balita dan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), serta PAUD

- Inisiasi pembentukan dan pendampingan kelompok bina keluarga di Kampung KB

2.3.3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2017 – 2021

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2017 – 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.3.1.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Kota Yogyakarta

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-	Rp 802.883.976	-	-	-	-	Rp 764.780.526,64	-	-	-	-	95,25%	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	-	Rp 1.146.517.951	-	-	-	-	Rp 827.660.389,68	-	-	-	-	72,19%	-	-

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Rp 8.040.000					Rp 8.039.000 ,00	-	-			99,99%		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Rp 1.253.998 .861					Rp 1.245.305 .478,04	-	-			99,31%		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Rp 849.129.9 90					Rp 837.390.5 90,00	-	-			98,62%		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					Rp 247.305.0 00					Rp 245.229.0 00,00	-	-			99,16%		

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (tanpa gaji)	-	-	-	-	Rp -1.902.382 .887	-	-	-	-	Rp -1.827.123 .211	-	-	-	-	96,04%	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	Rp -274.305.9 00	-	-	-	-	Rp -268.297.7 60,00	-	-	-	-	97,81%	-	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	-	Rp -3.288.748 .780	-	-	-	-	Rp -2.509.896 .933,00	-	-	-	-	76,32%	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	-	Rp -1.122.638 .340	-	-	-	-	Rp -1.064.008 .140,00	-	-	-	-	94,78%	-	-

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Jumlah	-	-	-	-	Rp 10.895.95 1.685	-	-	-	-	Rp 9.597.731 .028	-	-	-	-	88,09%	-	-

Dari tabel 2.3.3.1 di atas terlihat bahwa Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 88.09% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Bab IV RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2017 – 2022, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta, antara lain adalah kesenjangan ekonomi, kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar, pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, perlunya peningkatan potensi pariwisata, pengawasan perizinan investasi belum optimal, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya sarana prasarana pendukung olahraga dan kepemudaan, masalah kesatuan bangsa dan politik, masalah ketertiban dan keamanan, tingginya minat untuk bersekolah di Kota Yogyakarta, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal, jumlah taman dan RTH belum menunjukkan peningkatan, meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan, pengelolaan sampah dan limbah belum optimal, kinerja pelayanan air minum/air bersih masih rendah, pencemaran air sungai masih terjadi, permasalahan transportasi perkotaan, belum optimalnya pelayanan terkait kebencanaan, dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk.

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah permasalahan masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, dan upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal.

Upaya menghambat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan peran satgas sigrak, puskesmas, Pengadilan Agama, penyintas kekerasan, jejaring/mitra kerja untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan. Selain itu telah dilakukan kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah locus kejadian. Kerjasama juga menyasar ke sekolah dan wilayah, sehingga

sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya dan pada akhirnya mau bekerjasama dengan UPT PPA untuk mendukung dalam hal penanganan, pendampingan korban, reintegrasi dan psikoedukasi.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan upaya peningkatan keluarga sejahtera dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk. Upaya peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan salah satu terjemahan dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya untuk masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, menyasar pada persoalan kepadatan penduduknya, dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran. Jika melihat pada persentase migrasi keluar masuk penduduk Kota Yogyakarta di mana migrasi masuk lebih tinggi dibanding migrasi keluar, menunjukkan bahwa program KB tidak bisa dilihat secara parsial, namun merupakan program yang melayani semua penduduk yang berdomisi di Kota Yogyakarta, terlepas dari status KTP penduduk. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bersama-sama dengan Dinas PUPKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kemantren, juga menjadi SKPD pendukung dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai SKPD utama.

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;

- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Belum optimalnya kelembagaan PUG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 78,89% dan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 83,33%.
 - 2) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain yaitu 71,05 (Data BPS, 2020).
 - 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan;
 - 6) Belum optimalnya pelibatan Kelompok Gender dalam tematik pembangunan sesuai amanat SDG'S
 3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
 - 2) Ditemukannya TPPO;
 - 3) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
 - 4) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran;
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
 4. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;
 - 3) Belum efektifnya penanganan perkawinan anak;
 - 4) Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba;
 5. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- 1) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
 - 2) Belum terwujudnya Polres dan beberapa Polsek ramah anak;
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita;
 - 4) Belum permanennya status kelembagaan TPA milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - 5) Belum tersedianya Rumah Aman.
6. Permasalahan terkait kelestarian ber KB dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama:
- 1) Masih adanya pemakaian KB tradisional sebesar 8%. Sehingga pengguna KB tradisional perlu didorong untuk beralih ke KB modern.
 - 2) Jumlah PKB (22 orang) belum sebanding dengan jumlah kelurahan. Masing-masing PKB mendampingi 2 sampai 3 kelurahan.
7. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi):
- 1) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL),
 - 2) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKS
 - 3) Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R
8. Permasalahan terkait kerjasama lintas sektoral: masih diperlukan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil skoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan keadilan gender;
2. Perlindungan Hak Perempuan;
3. Perlindungan Anak;
4. Tumbuh Kembang Anak;
5. Kelestarian ber-KB;
6. Peningkatan Kualitas Kelompok Kegiatan untuk melakukan KIE
7. Kerja sama Lintas Sektoral

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 4.1.1 berikut ini.

Tabel 4.1.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.18	98.20	98.22	98.24
2	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
3.	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Menurunnya Kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
4.	Terkendalinya jumlah penduduk	Terkendalinya jumlah penduduk	CBR (<i>crude birth rate</i>)	10-9 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi DP3AP2KB oleh inspektorat	77,99	78,19	78,39	78,59

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini

Tabel 5.1.

Strategi dan Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2023-2026

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan perempuan	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
			Terlaksananya sosialisasi, advokasi kebijakan, dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota
			Terlaksananya advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota
Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
		Meningkatkan Perlindungan Anak	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus serta pencegahan kekerasan
			Tersedianya layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi dan memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terkendalinya Jumlah Penduduk	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	Terlaksananya Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan
			Terlaksananya Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan
		Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, Pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pelayanan KB MKJP, Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, serta Pembinaan Pelayanan KBKR
		meningkatkan kualitas layanan fasilitasi pelaksanaan program KKBPK di kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
		Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Terlaksananya dan meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Yogyakarta

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[OPD] 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
[TUJUAN] Meningkatnya keberdayaan perempuan										
[SASARAN] Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.16 (skala 0-100)	98.18 (skala 0-100)	98.20 (skala 0-100)	98.22 (skala 0-100)	98.24 (skala 0-100)	98.24 (skala 0-100)				
[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif		78,89%	78,89%	78,89%	83,00%	83,00%	783.273.171	783.273.171	783.273.171	783.273.171
[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										
Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	113.080.000	113.080.000	113.080.000	113.080.000

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	163.913.090	163.913.090	163.913.090	163.913.090
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	506.280.081	506.280.081	506.280.081	506.280.081
[TUJUAN] Menurunnya kekerasan terhadap perempuan										
[SASARAN] Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.09 %	0.09 %				
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan		88%	89%	90%	91%	91%	780.751.686	780.751.686	780.751.686	780.751.686
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	75.225.000	75.225.000	75.225.000	75.225.000

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	137.239.040	137.239.040	137.239.040	137.239.040
[KEGIATAN] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	568.287.646	568.287.646	568.287.646	568.287.646
[TUJUAN] Menurunnya kekerasan terhadap anak										
[SASARAN] Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.10 %	0.10 %				
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										
Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak		822-844 (Skala 0-1000)	844-866 (Skala 0-1000)	866-888 (Skala 0-1000)	888-910 (Skala 0-1000)	888-910 (Skala 0-1000)				
[KEGIATAN] Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak		143 organisasi	153 organisasi	163 organisasi	173 organisasi	173 organisasi	1.260.944.011	1.260.944.011	1.260.944.011	1.260.944.011
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	81.154.943	81.154.943	81.154.943	81.154.943
[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										
Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	926.107.639	926.107.639	926.107.639	926.107.639
[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	751.978.045	751.978.045	751.978.045	751.978.045
[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.920.000	29.920.000	29.920.000	29.920.000
[KEGIATAN] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota		40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	144.209.594	144.209.594	144.209.594	144.209.594
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender		65%	77%	88%	100%	100%	292.635.102	292.635.102		
[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan		25 organisasi	35 organisasi	44 organisasi	53 organisasi	53 organisasi	131.839.120	131.839.120	131.839.120	131.839.120

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
[KEGIATAN] Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	160.795.982	160.795.982	160.795.982	160.795.982
[TUJUAN] Terkendalinya jumlah penduduk										
[SASARAN] CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	10-9 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR				
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
CPR (Contraceptive Prevalence Rate)		50,70%	51,00%	51,30%	51,60%	51,60%	1.130.904.400	1.130.904.400	1.130.904.400	1.130.904.400
Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan		53,33%	68,89%	84,44%	100%	100%	465.750.000	465.750.000	465.750.000	465.750.000
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		24,12%	23,59%	22,53%	22%	22%	484.468.040	484.468.040	484.468.040	484.468.040
[KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										
Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	484.468.040	484.468.040	484.468.040	484.468.040
[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		45 kampung	45 kampung	45 kampung	45 kampung	45 kampung	465.750.000	465.750.000	465.750.000	465.750.000
[KEGIATAN] Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										
Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		662 orang	662 orang	662 orang	662 orang	662 orang	216.000.000	216.000.000	216.000.000	216.000.000
[KEGIATAN] Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	914.904.400	914.904.400	914.904.400	914.904.400
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna		5%	6%	7%	8%	8%	2.045.574.120	2.045.574.120	2.045.574.120	2.045.574.120
[KEGIATAN] Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	37.150.000	37.150.000	37.150.000	37.150.000

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
[KEGIATAN] Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2.008.424.120	2.008.424.120	2.008.424.120	2.008.424.120
[URUSAN] NON URUSAN										
[TUJUAN] Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB										
[SASARAN] Hasil penilaian reformasi birokrasi DP3AP2KB oleh Inspektorat	77.79 Nilai	77.99 Nilai	78.19 Nilai	78.39 Nilai	78.59 Nilai	78.59 Nilai				
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	7.702.764.745	7.702.764.745	7.702.764.745	7.702.764.745
[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										

Indikator	Kondisi Awal	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		44 laporan	44 laporan	44 laporan	44 laporan	44 laporan	6.193.507.110	6.193.507.110	6.193.507.110	6.193.507.110
[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	141.559.214	141.559.214	141.559.214	141.559.214
[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		56 unit	56 unit	56 unit	56 unit	56 unit	709.024.497	709.024.497	709.024.497	709.024.497
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	619.384.099	619.384.099	619.384.099	619.384.099
[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	33.289.825	33.289.825	33.289.825	33.289.825

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	78.89%	78.89%	78.89%	78.89%	83%	83%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	86,88%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	91,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	800-822 (skala 0-1000)	822-844 (skala 0-1000)	844-866 (skala 0-1000)	866-888 (skala 0-1000)	888-910 (skala 0-1000)	888-910 (skala 0-1000)
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian fasilitasi layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	43%	65%	77%	88%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	24%	24.12%	23.59%	22.53%	22%	22%
	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>)	50.40%	50,70%	51.00%	51,3%	51.60%	51.60%
	Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	40.00%	53.33%	68.89%	84.44%	100.00%	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	4%	5%	6%	7%	8%	8%

BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan "Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026" dapat terselesaikan.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Renstra di tahun mendatang.